

## **Analisis Swot Implementasi Online Single Submission (Oss) Dalam Optimalisasi Investasi Di Kabupaten Tulungagung**

### ***SWOT Analysis of Online Single Submission (Oss) Implementation in Optimizing Investment in Tulungagung Regency***

**Lisa Ariesta Nur Hanif<sup>1</sup>, M. Syaprin Zahidi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang;

<sup>2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang;

[lisaariesta2002@gmail.com](mailto:lisaariesta2002@gmail.com), [syaprin123@umm.ac.id](mailto:syaprin123@umm.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Dalam meningkatkan performa ekonomi digital, Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu wujud dari reformasi ekonomi digital yang diciptakan pemerintah Indonesia. Penerapan OSS juga merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan optimalisasi investasi di Indonesia dengan cara penyederhanaan birokrasi administrasi untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal. Dalam mewujudkan implementasiannya dalam masyarakat, pemerintah Indonesia memberikan komitmen agar pelayanan OSS ini bisa dilakukan dengan mudah, cepat dan tepat. Melihat Fenomena tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi Online Single Submission dalam mewujudkan optimalisasi Investasi di DPMPTSP Kabupaten Tulungagung dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis Swot bertujuan untuk menganalisis kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dari implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam upaya optimalisasi investasi di Kabupaten Tulungagung. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memeriksa persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan OSS.

**Keyword : Online Single Submission, investasi, analisis SWOT, Kabupaten Tulungagung, optimalisasi investasi.**

#### **ABSTRACT**

*In improving digital economic performance, Online Single Submission (OSS) is a form of digital economic reform created by the Indonesian government. Implementing OSS is also one of the government's ways of realizing investment optimization in Indonesia by simplifying administrative bureaucracy to provide quality and optimal public services. In realizing its implementation in society, the Indonesian government is committed to ensuring that OSS services can be carried out easily, quickly and precisely. Seeing this phenomenon, this research is aimed at finding out the implementation of Online Single Submission in realizing investment optimization in DPMPTSP Tulungagung Regency using a qualitative descriptive approach and Swot analysis method aimed at analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats. Threats) from the implementation of the Online Single Submission (OSS) System in an effort to optimize investment in Tulungagung Regency. Through a qualitative approach, this research*

*examines stakeholder perceptions and experiences as well as key factors that influence the success or failure of OSS implementation.*

**Keyword: Online Single Submission, investment, SWOT analysis, Tulungagung Regency, investment optimization.**

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini, perkembangan teknologi yang sangat masif ikut serta menjadi pengiring peranan pemerintah Indonesia dalam membangun perubahan. Salah satu penerapannya yakni kebijakan luar negeri Indonesia pada perekonomian yang menuju kearah digitalisasi. Digitalisasi merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang mana kehidupan akan menjadi sangat terbuka dan tanpa mengenal batasan wilayah. Digitalisasi di sektor perekonomian menjadi salah satu titik awal dari kekuatan ekonomi Indonesia di kancah Internasional. Dalam mencapai optimalisasi ekonomi digital Indonesia, pemerintah perlu memiliki berbagai strategi dalam bersaing di Industri global terutama dalam menarik investor asing yang terangkum dalam Roadmap Making Indonesia 4.0 (Kuncoro, 2020).

Dalam menarik investor asing tentunya Indonesia harus mempersiapkan berbagai cara mulai dari promosi investasi, reformasi birokrasi, dan memberikan kemudahan berinvestasi. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki tujuan investasi yang sangat tepat bagi para investor asing sebab memiliki beberapa keuntungan seperti pasar saham dan obligasi yang dianggap sangat baik, skema kerja sama pemerintahan dan badan usaha yang dapat diatur oleh lembaga pemerintahan. Pemerintahan Indonesia berupaya untuk dapat mengoptimalkan setiap langkah dalam menarik minat investor khususnya investor asing dengan melewati penerbitan rancangan peraturan pemerintahan dalam kemudahan berinvestasi. Regulasi kemudahan berinvestasi menjadi sebuah bentuk kepastian hukum bagi para investor.

Dengan upaya pemerintah melakukan pengoptimalisasian langkah ini dengan tujuan untuk dapat menarik investor asing. Skema Investasi yang dibuat oleh lembaga dalam pemerintahan Indonesia pada kenyataannya masih belum signifikan dalam memicu penarikan investor di Indonesia termasuk pada investor asing. Hal ini dapat dilihat dari indeks Ease of Doing Business yakni kemudahan berbisnis yang ditetapkan oleh bank dunia yang mana Indonesia sendiri masih berada pada tingkatan tujuh puluh tiga dengan pencapaian dibawah negara Vietnam dan Malaysia (Business, 2019). Penilaian indeks tersebut berdasarkan pada kemudahan berbisnis di Indonesia, hal tersebut dikarenakan masih minimnya peran sistem dalam proses dan prosedur pengurusan perizinan berinvestasi masih sangat minim dan rumit serta tidak adanya sebuah jaminan kepastian hukum bagi para pelaku investor untuk dapat berinvestasi di indonesia.

Prosedur serta proses izin yang minim dan rumit sehingga tercipta regulasi penanaman modal di Indonesia pada, Undang- undang no 1 tahun 1967 terkait Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang no 6 tahun 1968 terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Terciptanya undang-undang ini membuat bidang penanaman modal memunculkan sebuah kebijakan yang berada pada bidang investasi yang sifatnya diskriminasi dan mengakibatkan keengganan dalam investor asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia padahal lembaga pemerintahan sangat membutuhkan penanaman modal asing untuk dapat mendorong terjadinya perkembangan aktivitas ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Pada akhirnya, dibuat

terobosan pada bidang hukum pemerintah Indonesia pada undang-undang no 25 tahun 2007 terkait penanaman modal sebagai sebuah bentuk keseragaman penanaman modal di Indonesia dengan tujuan untuk dapat menghilangkan diskriminasi pada perlakuan bagi investor dalam negeri maupun investor asing.

Perubahan regulasi yang terjadi pada penanaman modal ini dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sebagai sebuah bentuk penyesuaian dari keadaan politik dan perekonomian yang akan terus berkembang khususnya di Indonesia. Kebaruan hukum yang terjadi pada penanaman modal sebagai sebuah upaya untuk dapat mengantisipasi pada perubahan ekonomi global dan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab lembaga pemerintahan Indonesia dalam kontribusi diberbagai bidang kerjasama ekonomi internasional, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang masif, promotif, dan keefisienan dengan masih mempertahankan kepentingan ekonomi nasional.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan regulasi terkait Penanaman Modal di Indonesia sampai fase penguatan dengan peraturan pemerintah no 24 tahun 2018 terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Seperti yang diketahui bahwasanya sistem dalam proses dan prosedur penanaman modal yang menjadi hambatan dimunculkannya peraturan pemerintah no 24 tahun 2018 terkait penggunaan Online Single Submission sebagai sistem pelayanan penanaman modal yang terintegrasi. Yang mana hal tersebut mengatur tentang berjalannya pengurusan perizinan investasi di bawah lembaga pemerintahan Indonesia yang mengeluarkan kewenangan dalam perizinan berinvestasi. Pelayanan perizinan usaha telah terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission memberikan perilaku yang sama bagi para investor dengan tujuan untuk melakukan penyederhanaan persyaratan serta prosedur investasi sebagai respon terhadap berkembangnya persaingan antar negara untuk dapat menanamkan modal asing mereka di Indonesia sekaligus sebagai sebuah jalan dalam memberi perubahan pada iklim investasi yang lebih kondusif (Pujiono, Dewi Sulistianingsih, 2022).

Dengan adanya langkah pembaruan peraturan pemerintahan, Indonesia mulai mengkhususkan dalam konteks diplomasi ekonomi yang mana berfokus pada sebuah jaringan kelompok berbisnis di luar negeri untuk dapat mempromosikan perdagangan dan investasi. Kegiatan ini melibatkan koordinator serta beberapa lembaga pemerintahan Indonesia yang menggandeng para kelompok bisnis dengan memperluas lingkup jaringan. Indonesia sebagai sebuah negara emerging economies memerlukan langkah strategis dalam melakukan strategi agar dapat tercapai target pembangunan ekonomi nasional. Bahwasanya sistem Online Single Submission adalah sebuah sistem yang digunakan untuk dapat membantu proses legalitas di Indonesia dengan ketentuan hukum yang ada. Proses legalitas ini merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dengan adanya ini pemerintahan Indonesia mengambil langkah dengan peranan BKPM selaku koordinator dari pelaksana investasi di Indonesia. Dalam hal ini BKPM sendiri melakukan penanganan di tingkat daerah dengan memantau sistem integrasi yang telah diciptakan dengan lembaga di bawahnya di tingkat daerah yakni di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dengan kata lain BKPM ini mempunyai akses daerah yang memiliki peranan secara teknis dalam proses investasi daerah termasuk di Tulungagung dengan lembaga dibawahnya sebagai pemeran secara teknis di tingkat daerah.

Pengaplikasian sistem Online Single Submission di Tulungagung dalam proses perizinan berusaha investasi sendiri masyarakat masih mengeluh bahwasannya pelaku usaha belum dapat mendaftarkan usaha mereka dikarenakan tidak tahu caranya mengaplikasikan sistem OSS ini. Hal tersebut terjadi sebab kebanyakan dari pemilik usaha atas nama masyarakat yang tergolong sudah lanjut usia yang mana ini menjadi sebuah gap untuk masyarakat dalam mengoperasikan sistem yang telah dibuat. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih banyak para pelaku usaha yang perlu didorong untuk dapat menggunakan sistem tersebut. Online Single Submission (OSS) di Tulungagung merupakan sebuah bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan realisasi penanaman modal dan dapat mempermudah proses perizinan berusaha. Sistem OSS merupakan sebuah sistem perizinan usaha yang telah terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk dapat membantu para pelaku usaha dengan melalui sistem elektronik yang telah terintegrasi. Dengan ini para pelaku usaha seperti halnya UMKM untuk dapat mengurus perizinan berusaha secara online (Kabar Tulungagung, 2021). Dengan adanya hal tersebut peneliti ingin menggali lebih terkait optimalisasi penggunaan sistem Online Single Submission dalam perkembangannya terutama pada investasi di Kabupaten Tulungagung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terkait Implementasi *Online Single Submission* yang dilakukan oleh salah satu PTSP di bawah kementerian investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung dalam rangka optimalisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Penelitian ini bersifat kualitatif yang berfokus pada pemahaman dalam mengenai faktor yang mempengaruhi optimalisasi investasi melalui sistem OSS. Dengan mengumpulkan data melalui wawancara yang melibatkan para pejabat pemerintahan daerah dan perwakilan masyarakat untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka terkait implementasi OSS, serta melakukan observasi dokumen resmi, kebijakan, dan laporan terkait investasi dan penerapan OSS di Kabupaten Tulungagung. Dengan penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana penerapan OSS dapat mempengaruhi optimalisasi investasi di Kabupaten Tulungagung dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam aktivitas perekonomiannya, penanaman modal merupakan aktivitas yang sering dilakukan guna menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, aktivitas tersebut juga merupakan salah satu aktivitas yang sangat berguna untuk transfer pengetahuan, teknologi, serta beberapa manfaat lainnya seperti penambahan devisa negara, penambahan penyerapan tenaga kerja dan masih banyak lainnya baik untuk negara penerima ataupun penanam modal. Penanaman modal atau seringkali dikenal dengan investasi merupakan aktivitas yang dilakukan baik dalam negeri maupun asing. Aktivitas tersebut hanya memiliki perbedaan pada pelakunya saja. Dalam hal ini pelakunya dibedakan menjadi 2 yakni, pelaku dalam negeri dan pelaku asing atau selain Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam hal ini, Penanaman modal seringkali menggandeng perusahaan untuk menanamkan modal termasuk salah satu syarat ketika

penanam modal asing ingin menanamkan modal di Indonesia. Namun tidak memungkinkan bahwasannya penanam modal menggunakan modalnya sendiri untuk menggandeng perusahaan yang berada dalam negeri. Dengan kata lain, Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki makna sebagai sebuah aktivitas menanam modal pada suatu negara oleh penanaman modal asing baik itu yang menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun itu perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri.

Melihat beberapa manfaat yang dapat diperoleh negara penerima investasi maka pemerintahan Indonesia memiliki upaya guna para investor melirik dan memiliki minat menanamkan modal di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan reformasi birokrasi dengan kata lain melakukan penyederhanaan prosedur investasi dan membuat jaminan hukum, ketenagakerjaan untuk investor terutama untuk investor asing. Selain itu, perlunya BKPM untuk mengerahkan lembaga di bawahnya di tingkat kabupaten maupun kota untuk memiliki langkah serius dalam menarik minat investor. Selain itu, bagi pemerintahan daerah sendiri seperti Kabupaten Tulungagung perlu melakukan langkah serius untuk dapat menekan munculnya peraturan daerah yang berkait dengan investasi (Prasetyo et al., 2021).

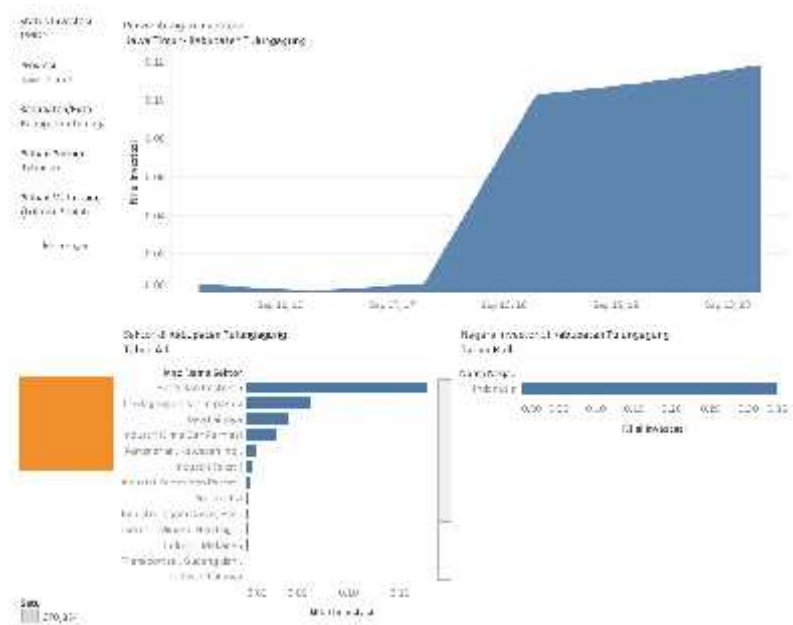
Namun, dengan diciptakannya regulasi guna proteksi, para investor tetap memiliki anggapan bahwa negara Indonesia belum mampu untuk memberikan jaminan hukum untuk penanam modal di negara Indonesia, hal tersebut bisa dilihat dalam isi peraturan pemerintah no

23 tahun 2014 terkait pemerintah daerah, dimana pemerintah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumahnya sendiri. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat mengeluarkan beberapa peraturan daerah guna melindungi aset daerahnya. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan izin penanaman modal di wilayahnya. Dikarenakan kewenangan pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai sebuah sumber pendapatan daerah yang memiliki dampak pada perekonomian di daerah tersebut. Dengan adanya hal tersebut, berbagai lembaga berwenang yang akan memberikan izin, baik itu secara benar ataupun salah itu dapat memunculkan sebuah hukum di sektor perizinan yang berdampak pada proses serta prosedur pengurusan perizinan yang menjadi rumit serta biaya yang cukup besar yang pada akhirnya akan memunculkan ketidakpastian hukum. Pentingnya kepastian hukum untuk investor memiliki peranan penting karena sebaik apapun pasar dan bahan baku namun adanya tumpang tindih terkait regulasi dengan pemerintahan negara setempat maka dapat dipastikan bagi investor akan enggan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Dengan kepastian hukum ini menjadi suatu upaya untuk mendatangkan para investor asing ke negara Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang telah ditanamkan para investor. (Hernawati & Suroso, 2020)

Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan izin, karena penerbitan izin merupakan syarat penting dalam melaksanakan pengaturan dan memiliki kendali pada aset daerah serta memiliki kontrol pada kegiatan masyarakat. Pada kenyataannya, kewenangan perizinan yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien di bidang perizinan, sebagaimana terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah mulai menerapkan konsep sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan sistem pelayanan “satu pintu”, meskipun penerapannya belum menjamin kemudahan perizinan. Dengan

diperkenalkannya konsep pelayanan atap tunggal, konsep sistem pelayanan tunggal semakin ditingkatkan, sedangkan syarat untuk memperoleh izin tetap tidak berubah. Konsep sistem pengelolaan payung terpadu tampaknya tidak membawa banyak perubahan di tingkat bawah, dimana investor masih percaya bahwa prosedurnya rumit dan persyaratan, jadwal dan biaya yang diperlukan tidak dapat diukur atau dijamin. Hambatan tersebut muncul diatasi oleh BKPM dengan mengeluarkan surat menteri dalam negeri nomor 25 tahun 1988 tentang pelayanan terpadu satu atap yang ditempatkan di daerah. Namun, hal tersebut tidak mengurangi hambatan yang ada dan semakin banyak kendala menumpuk mulai dari birokrasi, perizinan, koordinasi lintas Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mana berdampak ke proses dan prosedur dari perizinan sehingga tidak berjalan sesuai fungsi dan optimal. (Atmanto, 2019) Perihal penanganan SKPD, Kabupaten Tulungagung memiliki DPMPTSP Kabupaten Tulungagung selaku lembaga yang bekerja dibawah BKPM yang diperuntukan pengurusan perizinan usaha dan investasi.

Gambar 1 . Data Realisasi Investasi Kabupaten Tulungagung



Source : BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah yang terletak di Jawa timur dan memiliki potensi besar yang bisa berkembang menjadi sorotan investor dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut bisa ditemukan dalam wisata alam, perikanan, peternakan, berbagai industri (pengolahan, pangan, konveksi, tenun, kerajinan tangan, tembakau, metalurgi), serta holtikultura. Untuk saat ini objek wisata merupakan fokus utama Kabupaten Tulungagung dalam mencuri pandangan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi pembangunan di Kabupaten Tulungagung dalam tiga tahun terakhir baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan. Pada data yang diperoleh dari DPMPTSP Kabupaten Tulungagung ditemukan bahwa pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang signifikan (Ridlo,2023). Tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten

Tulungagung memiliki fokus pada sektor wisata dikarenakan wilayah ini memiliki potensi yang besar terkhususkan pada wilayah pesisir pantai yang bisa dikembangkan lebih lanjut dan menjadi peluang investasi yang menarik wisatawan dari berbagai kalangan.

Dengan adanya banyak potensi, Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan terbaru untuk menyederhanakan proses birokrasi dalam perizinan dan penanaman modal yang tertera pada peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Komersial Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa pelayanan akan terintegrasi secara elektronik yang disebut dengan Sistem Online Single Submission (OSS). Sistem Online Single Submission tersebut merupakan sistem aplikasi online Tunggal terkait izin komersial elektronik yang ada di Indonesia (Indonesia,2018). Dengan adanya hal ini, penggunaan sistem ini juga digunakan pada kegiatan perizinan penanaman modal di Kabupaten Tulungagung. Seperti yang dijelaskan banyaknya hambatan pada sistem birokrasi di Indonesia ini membuat terhambatnya bahkan enggan menanam modal di Kabupaten Tulungagung untuk datang. Dengan adanya sistem tersebut akan tercipta kemudahan perizinan yang pelaksanaannya harus cepat, mudah, transparan, aman dan nyaman. Kabupaten Tulungagung memungkinkan adanya sistem yang terintegrasi secara elektronik. Artinya, melalui adanya OSS (Online Single Submission) atau sistem perizinan online kewenangan pengurusan izin dan non izin masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelayanan teknis untuk memenuhi persyaratan lisensi yang diperlukan. Untuk lebih menarik investasi daerah harus mempunyai potensi yang bisa “dijual” kepada investor. Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus mampu memastikan daerah tersebut memiliki potensi bagi investor dalam menghadapi krisis perekonomian nasional dan global.

Di kabupaten Tulungagung sistem perizinan OSS pada peraturan Bupati nomor 60 tahun 2021 tentang Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, telah memungkinkan para pelaku usaha untuk dapat melakukan izin usaha secara online baik itu dalam bentuk perseorangan ataupun non perorangan(Tulungagung, 2021). Langkah dalam penggunaan sistem OSS meliputi dengan pendaftaran, pengisian data, verifikasi akun dan publikasi NIB serta izin untuk berusaha. Proses ini memungkinkan para pelaku usaha untuk dapat memperoleh izin usaha dengan lebih baik dan mudah. Tanpa harus pelaku usaha melalui sebuah proses konvensional yang memerlukan kehadiran pelaku usaha untuk datang ke kantor DPMPTSP. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pengguna OSS di Tulungagung, pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha tentang manfaat dan proses penggunaan OSS. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan partisipasi pengguna OSS di Tulungagung dapat meningkat dan memudahkan proses perizinan usaha di daerah tersebut. Dalam mempermudah perizinan yang ada pemerintah Indonesia yang mana Transparansi dalam sistem Online Single Submission (OSS) merujuk pada pelakuan yang terbuka, efisien, dan mudah diakses oleh pengguna. Sistem ini memudahkan semua proses perizinan dan memerlukan lebih dari 70 Undang-Undang, 47 Peraturan Pemerintah, ditambah dengan peraturan presiden dan Menteri.

Pelaksanaan izin Usaha melalui OSS menghasilkan pola keteraturan sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Partisipasi pengguna OSS di Tulungagung memberikan sebuah kemudahan dan manfaat besar bagi para pelaku usaha terutama di tengah kondisi pasca pandem yang menuntut para pelaku usaha untuk dapat

beradaptasi dan berinovasi. Dengan melalui sistem OSS proses perizinan usaha menjadi lebih mudah, cepat dan transparan yang memungkinkan para pelaku usaha untuk dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka. Namun untuk dapat memastikan efektivitas penuh dari OSS perlu adanya pendampingan, sosialisasi, dan pemahaman yang baik tentang sistem OSS ini untuk perlu ditingkatkan dengan lebih baik lagi (Tulungagung, 2021). Sistem Online Single Submission (OSS) telah menjadi inovasi yang signifikan dalam menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan investasi di Indonesia. Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik investasinya, telah mengimplementasikan OSS sebagai bagian dari upaya optimalisasi investasi. Selain itu, Kabupaten Tulungagung melakukan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menampilkan berbagai potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tanpa adanya proses publikasi atau promosi para investor atau pengusaha tidak akan bisa mengetahui potensi dan peluang investasi yang ada. Kegiatan promosi Kabupaten Tulungagung berupa pameran yang merupakan bentuk untuk mempromosikan potensi investasi dan peluang bagi para pengusaha atau investor yang ingin menanamkan modalnya. Pameran ini juga menjadi wadah bagi Kabupaten Tulungagung untuk menjaring investor baik lokal, daerah, nasional, maupun asing. Kabupaten Tulungagung mempunyai berbagai potensi daerah di Kabupaten Tulungagung mulai dari pariwisata, peternakan, industri dan sektor potensial lainnya. Tujuannya untuk menarik minat investor dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) untuk berinvestasi di Kabupaten Tulungagung guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam skala yang lebih besar. Dengan mengikuti kegiatan pameran ini Kabupaten Tulungagung berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mempromosikan potensi serta peluang investasi seperti wisata alam, produk-produk berkualitas serta sumber daya alam Tulungagung. Dengan cara ini potensi dan peluang investasi dapat diketahui dan menjadi perhatian masyarakat luas yang mana nanti pada akhirnya dapat mendorong investor untuk menanamkan modal mereka Kabupaten Tulungagung (Mintarti et al., 2021). Melihat beberapa hambatan yang ada, Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang merupakan alat yang efektif untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang dapat mengetahui sejauh mana implementasi OSS di Kabupaten Tulungagung.

### **Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan dapat dianalisis dari Efisiensi proses perizinan dan peningkatan daya tarik investasi dengan adanya Online Single Submission (OSS). Dalam peranan Efisiensi Proses Implementasi OSS memberikan keunggulan dalam efisiensi perizinan investasi. Proses yang lebih cepat dan lebih mudah dapat meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Tulungagung. OSS membawa transparansi dalam proses perizinan, mengurangi risiko korupsi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan akuntabel. Pengintegrasian data sistem OSS dapat diintegrasikan dengan berbagai instansi terkait, memungkinkan pertukaran data yang lebih efisien antar departemen, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan meningkatkan efisiensi proses perizinan dan daya tarik investasi. Melalui sistem Online Single Submission (OSS) memerlukan proses perizinan bisnis dapat dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, mengurangi hambatan birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah dan efisien. Selain itu sistem OSS juga



memungkinkan pendaftaran investasi baru dan perluasan bisnis dilakukan secara online, memberikan kemudahan akses dan konsultasi bagi para pelaku usaha. Sistem OSS dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi investasi di Kabupaten Tulungagung melalui peningkatan efisiensi proses perizinan. Dengan adanya sistem OSS dengan diharapkan dapat terjadi percepatan dalam perolehan izin usaha yang mana mendorong pertumbuhan investasi di daerah tersebut. Selain itu sistem OSS memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga terkait dalam proses perizinan sehingga dapat mengurangi tumpang tindih regulasi dan memperjelas prosedur perizinan.

Dengan demikian kekuatan implementasi Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari dua aspek utama yaitu dari efisiensi proses perizinan dan peningkatan daya tarik investasi. Melalui integrasi dan penyederhanaan proses perizinan sistem OSS yang berpotensi untuk dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif sehingga mendorong pertumbuhan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah (Invesment/BKPM, 2021).

### **Kelemahan (Weaknesses)**

Kelemahan dapat dilihat dari konektivitas internet pada daerah kabupaten Tulungagung, Pemahaman yang kurang terkait penggunaan platform OSS, dan adanya kesenjangan digital. Keterbatasan akses teknologi membuat beberapa pihak terutama pelaku usaha mikro dan kecil mungkin mengalami kendala dalam mengakses teknologi yang diperlukan untuk menggunakan OSS secara efektif, serta kurangnya sumber daya manusia yang unggul yang dapat mempengaruhi keterampilan dan infrastruktur teknologi yang memadai di Kabupaten Tulungagung.

Konektivitas internet di Kabupaten Tulungagung sangat penting dalam mengimplementasi sistem OSS. Ketidakpastian akses yang baik ke internet dapat menjadi hambatan dalam proses pengiriman laporan pengambilan pemerintah. Pemahaman yang kurang terkait penggunaan platform OSS juga menjadi kesulitan dalam implementasi ini. Masyarakat memiliki perasaan bahwa melihat berbagai jenis pengawasan dapat menyebabkan keberatan dan beban tambahan. Hal ini mungkin menyebabkan adanya resisten terhadap penggunaan platform sistem OSS. Munculnya kesenjangan digital yang ada di Kabupaten Tulungagung juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi OSS. Kesalahan ini dapat diperhatikan dari keterbatasan akses internet dan keterbatasan informasi dan pelatihan yang diberikan kepada pengguna (Irfani et al., 2021).

### **Peluang (Opportunities)**

Peluang dapat dianalisis dari Perbaikan di berbagai sektor di Kabupaten Tulungagung terkait dengan penyerapan tenaga kerja, pengembangan Usaha Mikro dan Kecil daerah. Selain itu adanya Transfer Teknologi. dari Peningkatan investasi dengan OSS, di Kabupaten Tulungagung memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri karena proses perizinan yang lebih cepat dan mudah. dengan mengembangkan ekonomi daerah ini Implementasi OSS dapat menjadi daya dorong untuk pengembangan ekonomi lokal, dengan adanya peluang bagi perusahaan teknologi untuk berkontribusi pada pengembangan OSS dan layanan pendukungnya.

Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam optimalisasi investasi di Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa kelemahan yang memunculkan peluang

dan kesempatan yakni. Pertama meskipun tujuannya adalah untuk memudahkan perizinan usaha, sistem OSS masih dihadapkan pada kompleksitas birokrasi dan regulasi yang membingungkan, yang dapat menghambat para pelaku usaha dalam memperoleh lisensi bisnis secara efisien. Kedua, terdapat kendala dalam proses integrasi dari sistem lama ke sistem OSS, yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam penerapan sistem OSS di tingkat daerah. Ketiga, meskipun OSS diharapkan dapat merangsang investasi, namun masih terdapat kekhawatiran terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah, serta transfer teknologi.

Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, perbaikan di berbagai sektor terkait dengan penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta transfer teknologi dapat menjadi peluang untuk mengatasi kelemahan implementasi OSS. Misalnya, pemerintah daerah dapat fokus pada penyederhanaan regulasi dan birokrasi terkait dengan investasi, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, upaya untuk memfasilitasi transfer teknologi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kebijakan dan program yang mendukung dapat menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan manfaat dari investasi yang masuk melalui sistem OSS. Dengan ini

pengimplementasi sistem OSS dihadapkan pada berbagai kelemahan namun ini dijadikan sebagai sebuah peluang untuk dapat melakukan perbaikan di berbagai sektor terkait dengan investasi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta transfer teknologi di Kabupaten Tulungagung. Upaya untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat integrasi sistem OSS, dan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta transfer teknologi dapat menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan manfaat dari sistem OSS bagi pembangunan ekonomi daerah(Wahyu Indra Cahyanto, 2023).

### **Ancaman (Threats)**

Ancaman dapat dianalisis dari Perubahan kebijakan dan Risiko keamanan data dan privasi dalam pengelolaan sistem Online Single Submission (OSS). Proses ini seringkali dihadapi dengan resistensi yang mana pihak yang tidak mendukung implementasi OSS dapat menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan program ini, serta tidak adanya kepastian hukum yang menjadikan ini sebagai sebuah ancaman terhadap perubahan regulasi dan hukum yang dapat mempengaruhi proses perizinan penanaman modal ini menjadikan sebagai sebuah tantangan yang perlu diatasi. Secara menyeluruh dari implementasi Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Tulungagung memiliki potensi besar untuk dapat meningkatkan peluang daya tarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun perlu diperhatikan lagi terhadap kendala teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia untuk dapat menunjang keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dari sistem Online Single Submission tersebut.

Perubahan arah kebijakan dapat menjadi ancaman, akan tetapi dengan melibatkan berbagai regulasi dan prosedur yang dapat berubah seiring waktu. Hal ini dapat mempengaruhi perizinan dan proses investasi di daerah Kabupaten Tulungagung. Selain itu dilihat dari risiko keamanan data dan privasi juga perlu dianalisis mengingat sistem OSS memerlukan pertukaran informasi sensitif secara daring. Ancaman terhadap keamanan data dan privasi dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses investasi dan pengelolaan OSS. Ketika melihat implementasi Online Single Submission (OSS) perubahan kebijakan dapat

menjadi ancaman serius yang perlu diperhatikan. Sistem OSS melibatkan integrasi berbagai regulasi dan prosedur serta arah perubahan kebijakan dapat mempengaruhi proses perizinan dan investasi di Kabupaten Tulungagung. Selain itu risiko keamanan data dan privasi juga merupakan hal penting yang perlu dianalisis. Dengan pertukaran informasi sensitif secara daring memunculkan adanya risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab ini perlu mengambil langkah-langkah perlindungan data dan privasi yang kuat sangat diperlukan dalam pengelolaan OSS.

Dalam konteks optimalisasi investasi di Kabupaten Tulungagung dengan mengimplementasi sistem Online Single Submission (OSS) membawa dampak ancaman yang perlu menjadi perhatian serius. Perubahan arah kebijakan dapat berdampak pada proses perizinan dan investasi, sementara risiko keamanan data dan privasi juga perlu dianalisis secara mendalam. Langkah-langkah ini perlu mitigasi risiko dan perlindungan data yang kuat harus menjadi fokus utama dalam menghadapi ancaman tersebut guna untuk memastikan bahwa implementasi OSS dapat berjalan secara lancar dan aman dalam mendukung optimalisasi investasi di daerah tersebut (Irfani et al., 2021).

## **KESIMPULAN**

Investasi membutuhkan yang namanya sebuah kepastian hukum baik itu dalam proses maupun perizinan jaminan perlindungan terhadap investasi yang telah ditanamkan sebagai sebuah kunci dari daya tarik bagi para investor yang berinvestasi di sebuah negara yang telah terintegrasi oleh sistem Online Single Submission. Online Single Submission dalam implementasinya mampu meningkatkan jumlah investor asing di negara Indonesia serta mempunyai keunggulan menampilkan sebuah data yang berkaitan dengan perizinan secara masif, tepat serta akurat, sehingga ini dapat meningkatkan performa dalam mewujudkan pengaplikasian sistem OSS yang tepat, efisien dan akurat dalam bidang perizinan berinvestasi di Indonesia. Sistem Online Single Submission tidak hanya merata pada jaringan internet saja melainkan pada sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sistem OSS yang berakibat pada tidak meratanya persebaran SDM yang mampu mengoperasikan sistem OSS di Kabupaten Tulungagung.

Implementasi Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Tulungagung memiliki potensi besar dalam optimalisasi investasi di daerah tersebut. Analisis SWOT dapat digunakan untuk dapat mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dari implementasi OSS dalam konteks investasi di Kabupaten Tulungagung. Dari segi implementasi OSS ini mempermudah proses perizinan investasi di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat dilihat dari daya tarik investasi di daerah tersebut dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, implementasi OSS juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan investasi sehingga dapat terjadi penurunan korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah. Namun Implementasi Online Single Submission (OSS) membawa potensi besar dalam mengoptimalkan investasi di Kabupaten Tulungagung. Dengan ini tentu dapat memperkuat kekuatan dan mengatasi kelemahan serta ancaman yang ada, dengan ini lembaga pemerintahan daerah dapat memaksimalkan peluang yang telah dioptimalisasikan dari Online Single Submission dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah dan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arena Hukum, 652–74. <https://kek.go.id/index.php?/online-single-submission>.
- Atmanto, P. D. (2019). THE ONLINE SINGLE SUBMISSION POLICY OF THE LOCAL GOVERNMENT APARATURE IN THE ERA OF GLOBALIZATION. *Jurnal*
- Delanova, M. O. (2020). Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Pasar Non Tradisional. *Jurnal Dinamika Global*, 4(02), 382–402. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i02.140>.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. 2021. “Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6 (1): 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>
- Indonesia, P. R. (2018). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.
- Investment/BKPM, M. O. (2021). SUSTAINABLE PATH TO ECONOMIC RECOVERY. Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021). Swot Analysis Model of Online Single Submission (Oss) Service Quality Improvement in Dpmpstsp East Java Province. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1), 1–26. <https://doi.org/10.33509/jan.v27i1.1456>
- Kabar Tulungagung. 2021. “Bimtek Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bagi Pelaku Usaha.” 2021. <https://kabar.tulungagung.go.id/bimtek-online-single-submission-risk-based-approach-oss-rba-dan-laporan-kegiatan-penanaman-modal-lkpm-bagi-pelaku-usaha/>.
- Kementerian Investasi. <https://oss.go.id/en/informasi/artikel/sustainable-path-to-economic-recovery>
- Knowledge . Toward a Media History of Documents, 3(2), 6.
- Kuncoro, Hestutomo Restu. 2020. “Kebijakan Luar Negeri Dan Potensi Sektor Ekonomi Digital Indonesia.” *Majelis* 6 (September): 99–118.
- Mintarti, S. U., Rachmawati, D., Handayani, S., Nasih, A. M., & Yusof, H. M. (2021). Online Millennial Women’s Financial Literation in Tulungagung District, Indonesia.

- Parmitasari, Rika Dwi Ayu, and Zulfahmi Alwi. 2020. "ALIRAN EKONOMI NEOLIBERALISME: SUATU PENGANTAR." *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* 1 (3): 59–69. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ssbm/article/view/18301/pdf>.
- Pembaharuan Hukum, 1(1), 2019. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/190-200/3684>
- Prasetyo, N. D., Istislam, I., & Hamidah, S. (2021). Perlindungan Kepentingan Nasional Dalam Penanaman Modal. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2), 270. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10630>
- Proceedings of the Sixth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2020), 179(Piceeba 2020), 124–130. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210616.019>
- Pujiono, Dewi Sulistianingsih, Laga Sugiarto. 2022. "REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)."
- Ridlo, M. A. (2023). Investasi di Tulungagung Alami Kenaikan. <https://tulungagung.inews.id/read/352620/investasi-di-tulungagung-alami-kenaikan>
- Tulungagung, B. (2021). PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG. Paper
- Wahyu Indra Cahyanto, J. S. (2023). Unlocking Indonesia's Investment Potential with OSS: Where Ease Meets Certainty. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(10), 6218–6221. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-59>